

POLICY BRIEF : KOLABORASI SMA OLAH RAGA DAN PPLP PROVINSI RIAU

Oleh :

Mishbahuddin, Kori Chayono, Suradi, Candra Sari Mutiara, Syartiwidya, Gevisioner

Bidang Litbang Bappedalitbang Provinsi Riau

Ringkasan Eksekutif

Pendidikan dan pembinaan olahraga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan atlet. Kondisi yang akhirnya menimbulkan permasalahan antara pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar belum bisa berjalan secara bersamaan, termasuk di Provinsi Riau. Provinsi Riau sudah memiliki SMA Olah Raga dan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), namun pada kenyataannya belum mampu mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar. Oleh karena itu, diperlukan suatu rumusan kebijakan pengembangan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) di Provinsi Riau yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar untuk dapat mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar berprestasi di Provinsi Riau.

Kata kunci: Kebijakan Pengembangan SKO, Pendidikan, Pembinaan, Olahraga, Provinsi Riau.

PENDAHULUAN

Olahraga menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Undang-Undang tersebut pada Bab VII pasal 21 sampai dengan pasal 30 telah mengatur jelas bagaimana cara Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan prestasi olahraga. Ada tiga jenis pemberdayaan olahraga yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu : (1) Olahraga Pendidikan ; (2) Olahraga Rekreasi ; (3) Olahraga Prestasi.

Ruang lingkup olahraga pendidikan dan olahraga prestasi menjadi fokus utama dalam pembinaan dan pengembangan pemerintah

provinsi, dimana ruang lingkup olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan yang dapat dilaksanakan pada jalur pendidikan formal pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dinyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau telah memiliki SMA Olahraga yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dengan jumlah atlet/siswa mencapai 467 orang pada tahun 2021 (Gambar 1). Disamping itu Provinsi Riau juga telah memiliki Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang dikelola

oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau untuk beberapa cabang olahraga yang ada, dengan jumlah atlit mencapai pada tahun 2021 sebanyak 138 orang (Gambar 2).



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Cabang Olah Raga (Cabor), Atlet dan Pelatih Tahun 2017-2021 di SMA Olah Raga Provinsi Riau

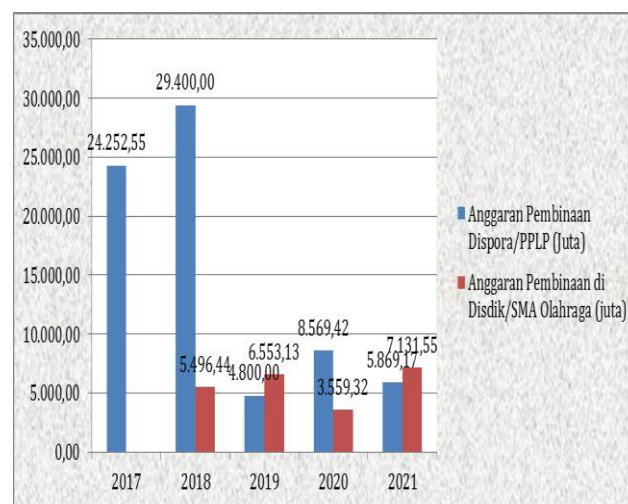


Gambar 2. Perkembangan Jumlah Cabang Olah Raga (Cabor), Atlet dan Pelatih Tahun 2017-2021 di PPLP Riau

Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa jumlah atlit dan pelatih pada 2 institusi olah raga tersebut menunjukkan trend penurunan selama 3 tahun terakhir, yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya anggaran yang semakin menurun (Gambar 3), sehingga berdampak pada pencapaian prestasi atlit (Gambar 4 dan 5).

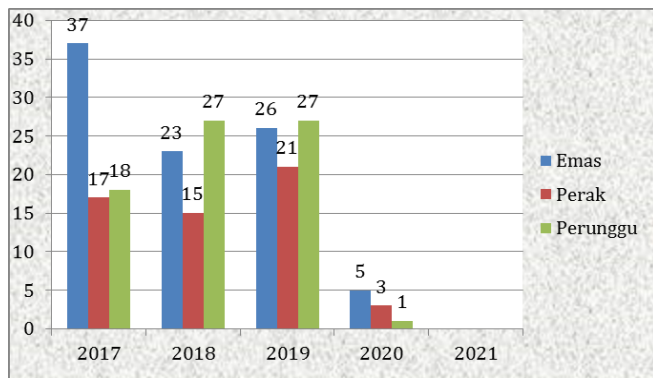
Namun dalam mewujudkan atlit prestasi dan berkesinambungan, fungsi dan peran kedua wadah keolahragaan tersebut belum maksimal, karena beberapa faktor penyebab diantaranya : 1)

Proses pembinaan belum terkoordinasi dan terkonsepsi secara mikro maupun makro, 2) Cabang olahraga (Cabor) prioritas belum terpetakan dengan jelas, serta program jangka panjang belum terencana dengan baik, 3) Koordinasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, KONI, Pengurus Cabor telah berjalan dengan baik namun masih terbatas dan bersifat temporer.

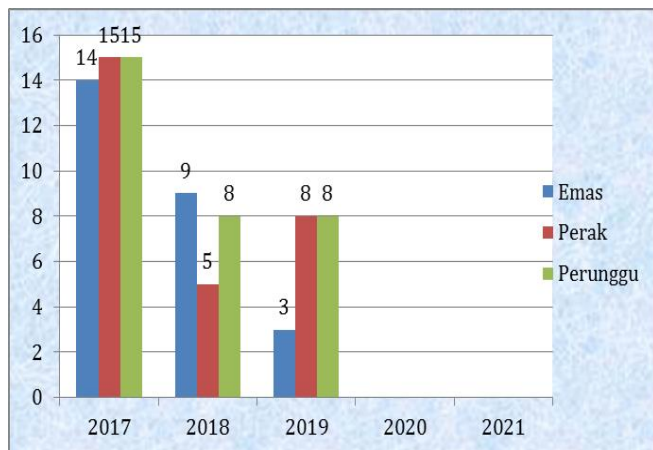


Gambar 3. Perkembangan Anggaran Pembinaan Tahun 2017-2021 di SMA Olah Raga dan PPLP Provinsi Riau.

SMA Olah Raga dan PPLP dapat diintegrasikan atau digabungkan menjadi sekolah keberbakatan olahraga (SKO), agar dapat lebih optimal dan berdampak dalam meningkatkan kualitas atlit pelajar yang dibina secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga dipandang perlu melakukan kajian “Penggabungan SMA Olahraga dengan PPLP menjadi satu kesatuan SKO Provinsi Riau” Terkait fokus pembinaan olahraga yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut, bahwa pembinaan atlet-atlet pelajar di Provinsi Riau masih terdapat beberapa permasalahan terutama dalam pengembangan olahraga pendidikan dan olah raga prestasi yang menyebabkan pembinaan atlit prestasi belum maksimal.



Gambar 4. Perkembangan Perolehan Medali Tahun 2017-2021 oleh Atlit SMA Olah Raga



Gambar 5. Perkembangan Perolehan Medali Tahun 2017-2021 oleh Atlit PPLP Provinsi Riau

METODOLOGI

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Lokus dalam penelitian ini adalah di Provinsi Riau. Provinsi Riau saat ini sudah mempunyai SMA Olah Raga dan PPLP yang diharapkan menjadi embrio dari SKO. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Diskusi (FGD) dengan informan terpilih. Adapun informan yang dipilih yaitu : (1) Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga dan Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Riau (2) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, (3) Kepala Sekolah SMA Olah Raga Provinsi Riau, (4) Ketua KONI Prov. Riau; (5) Pelatih PPLP PNS dan Non-PNS. Analisis data yang digunakan adalah

SWOT analisis. Dalam memformulasikan kebijakan publik, mempunyai beberapa tahapan (Winarno, B. 2008) sebagaimana berikut : (a) Perumusan Masalah; (b) Agenda Kebijakan; (c) Pemilihan Alternatif Kebijakan (d) Penetapan Kebijakan.

Masih terpisahnya kegiatan pendidikan dan pembinaan olahraga yang menyebabkan koordinasi dan integrasi sering terkendala, adanya penganggaran yang ganda untuk cabang olahraga yang sama antara PPLP dan SMA Olahraga, penurunan prestasi, kurikulum yang belum sesuai untuk standar SKO, dan kurang selarasnya program pembinaan olahraga antara pemerintah pusat dan daerah..

Beberapa faktor penghambat yang ada, antara lain :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung latihan untuk atlet pada SMA Olahraga yang harus menyewa karena adanya Perda tentang retribusi.
- Minimnya anggaran makan minum atlet, tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan atlet dan tidak diatur oleh ahli gizi yang kompeten.
- Belum adanya seleksi pelatih yang ketat dengan melihat program, kurikulum, sertifikasi yang dimiliki pelatih bersangkutan
- Belum adanya SOP mengenai seleksi atlet/siswa PPLP dan SMA olahraga dan Pelatih di PPLP dan SMA Olahraga, hanya berpedoman pada SPM dari Kemenpora.

HASIL/ TEMUAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat dirumuskan 2 (dua) alternatif kebijakan pembinaan atlet berprestasi di Provinsi Riau, yakni

1.1. Kebijakan Pengembangan SKO

Melalui pengembangan SKO diharapkan mampu mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar karena pelaksanaan teknis dari Sekolah Olahraga akan

berbeda dengan sekolah menengah pada umumnya yaitu kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan pembinaan olahraga provinsi Riau, serta untuk meningkatkan atlet berprestasi.

Kebijakan pembiayaan akan lebih optimal dan maksimal dari anggaran APBD maupun APBN yang dapat diserap dalam pembinaan atlet di Provinsi Riau.

Dukungan sepenuhnya dari pihak lain, seperti: Swasta, KONI, Pakar Olahraga, dan Pelatih, dapat dimanfaatkan dalam pembinaan olahraga provinsi Riau.

Pengembangan SKO haruslah didukung dengan legalitas, yakni melalui kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

Sarana prasarana olahraga baik tempat latihan dan asrama atlet sudah berada dalam satu Kawasan yang tidak berjauhan, sehingga untuk pengembangan menjadi SKO tidak membutuhkan lahan baru, hanya difokuskan pada perbaikan gedung dan penambahan sarana Latihan (Gambar 6)

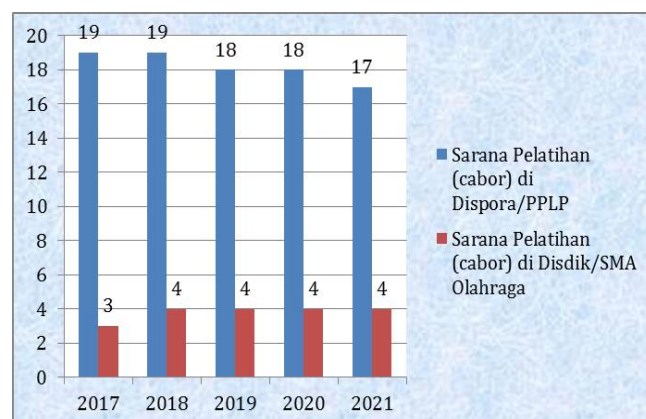
Kewenangan dan tugas pokok dari masing-masing Dinas teknis pelaksana, komitmen yang tinggi dan konsistensi dari Pemerintah Pusat, seluruh jajaran Dispora, Dinas Pendidikan, KONI, Perguruan Tinggi, pihak swasta, serta kemampuan SDM mendukung pengembangan SKO.

1.2. Kebijakan tetap mempertahankan PPLP dan SMA Olahraga

Belum mampu mengatasi permasalahan dalam pengembangan atlet di Provinsi Riau karena alternatif kebijakan ini, hanya bersifat kesepakatan tanpa adanya Batasan kewenangan yang jelas antara pembinaan Dispora dan Disdik provinsi Riau., seperti: penganggaran yang ganda pada cabang olahraga yang sama

Kurikulum pendidikan di sekolah yang belum sesuai dengan standar kurikulum SKO, sehingga sulitnya siswa/atlet untuk mengikuti Latihan/ try-out.

Pemanfaatan sarana prasarana belum dapat digunakan secara optimal, khususnya oleh SMA Olahraga saat ini, seperti adanya sistem penyewaan pada sarana milik Pemerintah Provinsi Riau dibawah pengelolaan Dispora.



Gambar 6. Perkembangan Sarana Pelatihan Tahun 2017-2021 di SMA Olahraga dan PPLP Provinsi Riau.

Pembinaan atlet tidak akan optimal dikarenakan adanya dua instansi Pembina dan dua lokasi Latihan dan tempat tinggal yang berbeda untuk beberapa cabang olahraga.

Penganggaran untuk pembinaan akan terbagi menjadi dua, sehingga akan berdampak beban pada APBD Provinsi Riau, dan berkurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Masih kurangnya dukungan dari berbagai pihak lain, seperti pihak swasta, KONI dan perguruan tinggi.

Kewenangan yang belum jelas dalam pembinaan prestasi atlet olahraga dan kurikulum Pendidikan.

Pemilihan Alternatif Kebijakan

Pemilihan alternatif kebijakan menggunakan metode *content analysis* berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh. Alternatif kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar maka dipilihlah Kebijakan Pengembangan SKO. Pengembangan SKO dapat menyatukan antara kegiatan pendidikan dan pembinaan olahraga di satu tempat sehingga pembinaan dilakukan secara terpusat.

SKO adalah sekolah yang nantinya akan berada dibawah satu kewenangan, bisa dibawah kewenangan Dinas Pendidikan atau Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Riau. Koordinasi harus tetap dilakukan antara dua dinas, serta koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain koordinasi, perlu juga dilakukan sebuah evaluasi mulai dari sistem rekrutmen pelatih/guru dan atlet/siswa sampai prestasi olahraga provinsi Riau. Penganggaran dalam pembinaan atlet akan lebih fokus pada semua cabang olahraga tanpa adanya penganggaran ganda.

Kurikulum yang digunakan dalam SKO akan sesuai dengan standar kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah keberbakatan.

REKOMENDASI

Setelah melakukan serangkaian proses Formulasi Kebijakan Publik berdasarkan data dan fakta, maka dirumuskan rekomendasi kebijakan yaitu

1. Mendirikan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO), dimana dengan membentuk SKO dinilai tepat dan mampu untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar di Provinsi Riau.
2. Membangun komitmen dari Kepala Daerah dalam pengembangan Pendidikan SKO melalui Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
3. Perlunya kejelasan dan kesepakatan yang membahas mengenai :
 - a. Perlu melakukan koordinasi dan bimbingan teknis secara berkala dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia agar para aparat teknis pelaksana memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam Kebijakan Pengembangan SKO.
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau harus selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, KONI Provinsi Riau, serta masing-masing

Cabang Olahraga agar mempunyai satu pandangan terkait pentingnya pengembangan SKO.

- c. Melakukan kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM terutama kualitas pelatih/guru olahraga agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
 - d. Membuat SOP / Petunjuk Teknis dalam rekrutmen atlet/siswa dan pelatih/guru.
4. Membangun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat agar masing-masing pihak bersinergi dan dapat bekerjasama dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, mengendalikan, serta mengawasi jalannya Kebijakan Pengembangan SKO di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Collins, D, et al. (2019). Research and Practice in Talent Identification and Development-Some Thoughts on the State of Play. *Journal of Applied Sport Psychology*, 31(3): 340-351)
- Keban, Yermias. T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Poerwanti, Yuni. 2012. Manajemen Olahraga Nasional Dari Kebijakan Hingga Komitmen Teori dan Aplikasi. Jakarta Timur : MAGNAScript Publishing.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung : Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Penyelenggaraan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP). Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan Iptek Olahraga Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2006.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.